

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI
TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN SAMPANG
(Studi Kasus PKL Disekitar Monumen Kota Sampang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memenuhi Gelar Sarjana
Pada Fisip UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

IIS IDAWATI
NPM. 0541010051

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2010**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI
TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN SAMPANG
(Studi Kasus PKL Disekitar Monumen Kota Sampang)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Pesyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fisip UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

**IIS IDAWATI
NPM. 0541010051**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2010**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan terima kasih atas kehadiran Tuhan YME, dengan segala limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH SEKITAR MONUMEN KOTA SAMPANG MADURA”**

Skripsi penelitian ini sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi. Penyusunan ini sangatlah singkat dan terbatasnya waktu dalam penyusunan maupun pengumpulan data-data yang dibutuhkan.

Penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada yang terhormat Ibu Dra. Diana Hertati, MSi, Selaku Dosen Pembimbing Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran”
2. Bapak Dr. Lukman Arif, Msi., Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Dra. Diana Hertati, Msi., Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmunya.
5. Bapak H. Rudi Setiadi, SE, MM. Sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik kabupaten Sampang yang telah memberikan ijin untuk penelitian kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai & Staff Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Sampang.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, semangat serta memberikan doa & restu kepada penulis.

8. Sahabat saya Vivi yang sudah lulus duluan terima kasih doa & dukungannya untuk penulis & sahabat saya Tiza yang juga selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Special to “Ratna Amilia” Sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa & membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat saya Hendri yang turut serta mendoakan & memberikan semangat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi dan memberikan pahala berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi penelitian ini.

Skripsi penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan skripsi penelitian ini. Penulis juga memohon maaf bila terdapat sesuatu yang kurang berkenan di dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1. Kebijakan Publik	15
2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2.2.1.2. Dimensi Kebijakan Publik	18
2.2.2. Implementasi Kebijakan	25
2.2.3. Sektor Informal	29
2.2.3.1. Pengertian Sektor Informal	29
2.2.3.2. Ciri-ciri Sektor informal	30
2.2.3.3. Penyebab Hadirnya Sektor Informal	32
2.2.3.4. Peran Sektor informal	33
2.2.4. Pedagang Kaki Lima	34
2.2.4.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	34

2.2.4.2. Sektor Informal Pedagang kaki Lima	36
2.2.5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002	38
2.2.6. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi	39
2.2.7. Ketentuan Retribusi	40
2.2.8. Tata Cara Pembayaran	40
2.3. Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Obyek, Fokus dan Instrumen Penelitian	42
3.2.1. Obyek Penelitian	42
3.2.2. Fokus Penelitian	43
3.2.3. Instrumen Penelitian	45
3.3. Situs Penelitian	46
3.4. Sumber Data	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data	48
3.6. Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	52
4.1.1. Gambaran Umum Obyek Kecamatan Sampang Madura	52
4.1.2. Visi dan Misi Kecamatan Sampang	53
4.1.3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sampang	54
4.1.3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ...	54
4.1.3.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sampang	55
4.1.3.3. Mata Pencarian Penduduk	

Kecamatan Sampang	56
4.1.3.4. Struktur Organisasi Kecamatan Sampang	57
4.1.3.4.1. Tugas Dan Fungsi Pokok	
Organisasi Kecamatan Sampang ...	58
4.1.3.5. Komposisi Pegawai Kecamatan Sampang ...	62
4.1.3.5.1. Komposisi Pegawai Kecamatan	
Sampang Menurut Jenis Kelamin .	62
4.1.3.5.2. Komposisi Pegawai Kecamatan	
Sampang Menurut Pendidikan	63
4.1.3.5.3. Komposisi Pegawai Kecamatan	
Sampang Menurut	
Pangkat / Golongan	64
4.2. Gambaran tentang Pedagang Kaki Lima	
di Kecamatan Sampang	65
4.2.1. Keberadaan Pedagang Kaki Lima	
di Kecamatan Sampang	65
4.2.2. Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sampang	66
4.2.2.1. Struktur Organisasi Paguyuban	
PKL PUJASERA	67
4.2.2.1.1. Tugas Dan Fungsi Pokok	
Paguyuban PKL PUJASERA	67
4.2.3. Satuan Polisi Pamong Praja	68
4.2.3.1. Struktur Organisasi SATPOL – PP	
Kecamatan Sampang	68

4.2.3.2.	Tujuan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Polisi Pamong Praja	69
4.2.3.3.	Tugas Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan Dan Pemenuhan HAM	71
4.2.3.4.	Penindakan Secara Tegas	73
4.3.	Hasil Penelitian	73
4.3.1.	Ketentuan retribusi yang diatur dalam Perda No.27 Tahun 2002 Kota Sampang	74
4.3.1.1.	Pengenaan retribusi setiap orang (Ketentuan Retribusi Bagi Setiap Orang yang menggunakan tempat)	74
4.3.1.2.	Azas Pembayaran Retribusi	77
4.3.1.3.	Bentuk, Ukuran Dan Warna Karcis Di Tetapkan Oleh Pemerintah Daerah Dengan Di Beri Tanda Perporasi / Pengesahan	81
4.3.2.	Tata Cara Pembayaran Retribusi Diatur Dalam Perda 27 Tahun 2002 Kota Sampang	82
4.3.2.1.	Kepala Daerah Menentukan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi	82
4.3.2.2.	Kepala Daerah Menentukan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi	84
4.4.	Pembahasan	86
4.4.1.	Ketentuan retribusi yang diatur dalam Perda No.27 Tahun 2002 Kota Sampang	86

4.4.1.1. Pengenaan retribusi setiap orang (Ketentuan retribusi bagi setiap orang yang menggunakan tempat)	87
4.4.1.2. Azas Pembayaran Retribusi	88
4.4.1.3. Bentuk, ukuran dan warna karcis di tetapkan oleh pemerintah daerah dengan di beri tanda perporasi/pengesahan	92
4.4.2. Tata Cara Pembayaran Retribusi Diatur Dalam Perda 27 Tahun 2002 Kota Sampang	93
4.4.2.1. Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi	94
4.4.2.2. Sanksi administrasi Berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Jumlah Pedagang dan Jenis Usaha Yang Diperdagangkan Para PKL di Daerah Sekitar Monumen Kota Sampang Madura	6
Tabel 4.1.	Jumlah Kelurahan Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Sampang Dengan Luas Wilayahnya	53
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sampang Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sampang Menurut Tingkat Pendidikan	55
Tabel 4.4.	Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Sampang	56
Tabel 4.5.	Jumlah Pegawai Kecamatan Sampang Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 4.6.	Jumlah Pegawai Kecamatan Sampang Menurut Pendidikan ..	63
Tabel 4.7.	Jumlah Pegawai Kecamatan Sampang Menurut Pangkat/Golongan	64
Tabel 4.8.	Data Jumlah Pedagang dan Jenis Usaha Yang Diperdagangkan Para PKL di Daerah Sekitar Monumen Kota Sampang Madura	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif	51
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Sampang	57
Gambar 4.2.	Struktur Organisasi Paguyuban PKL Pujasera	67
Gambar 4.3.	Struktur Organisasi Satpol PP Kecamatan Sampang	69

ABSTRAKSI

Iis Idawati. Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (Studi Kasus PKL di Sekitar Monumen Kota Sampang).

Kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima di daerah perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan kaki lima antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang ? sedangkan penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang”. Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perda No.27 Tahun 2002 yang berisi tentang tentang retribusi pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima. Situs penelitian dilakukan di alun-alun kota Sampang dan yang fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan Perda Daerah Kota Sampang Nomor 27 Tahun 2002 tentang retribusi pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Kota Sampang, Satpol PP dan para pedagang kaki lima di alun-alun kota Sampang.

Dalam penelitian kualitatif digunakan variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah implementasi kebijakan retribusi pengaturan tempat usaha perdagangan kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang Madura. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu *Depth Interview*, Observasi dan Dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini yang mengenai kebijakan retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang yang pertama yaitu mengenai ketentuan retribusi yang diatur dalam Perda No.27 Tahun 2002 Kota Sampang kebanyakan para pedagang ada yang tidak keberatan dan ada pula yang keberatan dengan penarikan retribusi yang dibebankan kepada para pedagang, kemudian mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dalam Perda 27 Tahun 2002 Kota Sampang yaitu pembayaran retribusi diatur dalam Perda 27 Tahun 2002 Kota Sampang dan bagi yang terlambat membayar retribusi akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu kebanyakan pedagang keberatan dan ada juga yang keberatan dengan penarikan retribusi yang dibebankan kepada para pedagang karena para pedagang menganggap penarikan retribusi memberatkan para pedagang.

Keywords: Pedagang Kaki Lima, Perda No.27 Tahun 2002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau Madura merupakan sebuah pulau yang mempunyai karakteristik yang cukup spesifik dibanding dengan wilayah-wilayah lain di propinsi Jawa Timur. Secara demografis, Madura tergolong wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Bahkan tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Sampang (889 jiwa/km²) lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kepadatan propinsi Jawa Timur (726 jiwa/km²). Sementara itu komposisi etnis dan umat agama di wilayah tersebut cenderung homogen. Etnik madura-muslim adalah kelompok yang paling dominan.

Ekosistem di pulau Madura merupakan ekosistem ladang yang dikembangkan di atas tanah yang kering dan tandus. Oleh sebab itu sektor okupasi didominasi oleh pertanian ladang. Namun sektor ini kurang produktif. Sektor produksi lainnya juga kurang berkembang pesat. Pertumbuhan (proliferasi) sektor ekonomi cenderung lambat karena banyak sektor ekonomi menggunakan sistem produksi yang sederhana sehingga tidak menstimuli pertumbuhan sektor-sektor lain yang terkait.

Secara keseluruhan, Madura termasuk salah satu daerah miskin di provinsi Jawa Timur. Tidak seperti Pulau Jawa, tanah di Madura kurang cukup subur untuk dijadikan tempat pertanian. Kesempatan ekonomi lain yang terbatas telah mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Faktor-faktor ini

telah mengakibatkan emigrasi jangka panjang dari Madura sehingga saat ini banyak masyarakat suku Madura tidak tinggal di Madura. Penduduk Madura termasuk peserta program transmigrasi terbanyak. (<http://www.kabarmadura.com/ekonomi-madura.html>)

Partisipasi angkatan kerja di pulau Madura tergolong tinggi. Konsentrasi ada pada sektor pertanian (70-80%), namun tingkat produktifitas relatif rendah. Tingginya tingkat konsentrasi kerja namun tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas juga terlihat dari konsentrasi angkatan kerja di sektor informal di daerah urban atau sub-urban. Sedangkan kondisi kesejahteraan penduduk Madura tergolong rendah secara nasional. Ini terlihat dari *Human Development Index* (HDI) pada empat kabupaten yang lebih rendah daripada Jawa Timur sekalipun. Demikian pula *Gender Development Related Index* (HDI) dan *Human Poverty Index* (HPI) keempat kabupaten-kabupaten tersebut. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Madura pada tahun 2002 tergolong paling rendah di Jawa Timur. Dengan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi dan tidak terkendali mengakibatkan masyarakat tersebut mencari lapangan kerja sendiri dengan terjun ke dalam sektor informal.

Menurut sejumlah kajian ekonomi menjelaskan bahwa merebaknya sektor informal tidak lain disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Pembangunan hanya terpusat di kota (bias urban). Sementara itu, pembangunan pertanian di desa (modernisasi pertanian) justru mengurangi jumlah tenaga kerja dan menambah pengangguran akibat lebih lanjut adalah menurunnya kesempatan kerja, dan perbedaan tingkat yang semakin tinggi.

Sektor informal yang ditempuh oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka adalah dengan berjualan dan menjadi pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai membutuhkan modal dan keahlian atau ketrampilan yang minim serta tidak memerlukan pendidikan formal. Dengan demikian, membuka lapangan pekerjaan sendiri dianggap menjadi solusi yang tepat walaupun penghasilan dari penjualan mereka tidak tentu namun setidaknya dapat meringankan beban hidup mereka.

Kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima di daerah perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan kaki lima antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Keadaan ini pada satu sisi dianggap sebagai pedagang kaki lima memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. (Alisjahbana, 2006 : 37)

Menurut Pemerintah Indonesia pedagang kaki lima adalah seseorang yang menjalankan usaha perorangan dengan berjualan barang-barang di bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya. Secara garis besar, Pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan pedagang kaki lima mengganggu kenyamanan pengguna kota atau kawasan karena melakukan kegiatan ekonomi di kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang

mengatur tempat bagi para pedagang kaki lima sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan pengguna kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan bahwa diperlukan adanya pemberdayaan usaha mikro dan penataan sektor informal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan, serta peran usaha mikro dan sektor informal terutama pedagang kaki lima, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian sebenarnya pemerintah mengakui keberadaan pedagang kaki lima dan perannya untuk memperkuat masyarakat ekonomi lemah. Dalam mengembangkan peran tersebut, pemerintah sebenarnya sudah membentuk undang-undang yang menyatakan bahwa perlunya menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima.

Kehadiran pedagang kaki lima, sebagai salah satu elemen keberadaan gaya sentripetal, telah berlangsung sejak jaman pemerintahan Belanda. Proses terciptanya fenomena kaki lima disebabkan oleh adanya konsep *involution* yang dikembangkan oleh Pemerintah Belanda. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lapangan pekerjaan. Pemerintah kolonial mengambil inisiatif untuk membuka sistem ekonomi *bazaar* bagi penduduk pribumi. Dengan demikian, pemenuhan lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok dapat diatasi. Setelah pendudukan kolonial,

sistem ekonomi *bazaar* ini terus berkembang dan tidak terkendali sehingga munculnya fenomena pedagang kaki lima di perkotaan.

Cross (1998) dalam Adianto (2004 : 40), menyatakan bahwa kegiatan perdagangan informal seperti kaki lima sulit dihentikan karena adanya perbedaan yang mencolok antara daya beli masyarakat dengan harga jual komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan formal. Geertz dalam Adianto (2004 : 40) menilai bahwa kegiatan perdagangan jenis ini berusaha menjalin hubungan jual-beli secara personal melalui harga komoditas yang fleksibel. McGee dalam Adianto (2004 : 40) menambahkan, selain faktor perbedaan tersebut, penyebab utama berkembangnya jenis perdagangan informal karena kebebasan pedagang untuk menentukan pendapatannya dan waktu bekerja. Perbedaan tidak dapat dihindari karena polarisasi dalam masyarakat terjadi atas dasar perbedaan tingkat ekonominya. Keberadaan perbedaan ini memang tidak dapat disatukan namun harus diwadahi agar dapat terjalin hubungan simbiosis-mutualisme, bukan simbiosis parasitisme.

Kebijakan pemerintah mengenai retribusi dan pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di alun-alun kota Sampang diatur dalam Kebijakan Perda No. 27. Perda Kabupaten Sampang Nomor 27 tahun 2002 ini mengatur tentang retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima dalam Kota Sampang dan kebijakan pemerintah daerah mengenai retribusi diserahkan kepada satpol PP adalah keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/407/KEP/343.103/2003 yang berisi yaitu menunjuk Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang sebagai pejabat yang menangani

retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang.

Pedagang Kaki Lima yang berjualan harus mematuhi aturan Perda No.27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tempat berjualan, maka pada tahun 2002 dibentuk paguyuban Pujasera sebagai pemersatu. Paguyuban pedagang kaki lima mengatur hubungan antara pedagang kaki lima, mengkoordinasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tempat berjualan. Sampai saat ini jumlah anggota paguyuban 78 orang dan tidak bisa ditambah lagi, bisa tambah apabila ada pedagang kaki lima yang keluar dari paguyuban, hal ini karena tempat yang disediakan sudah tidak ada.

Berikut adalah tabel jumlah pedagang yang ikut dalam paguyuban di Kabupaten Sampang paguyuban Pujasera sebagai pemersatu:

Tabel 1.1
Data Jumlah Pedagang dan Jenis Usaha Yang Diperdagangkan
Para PKL di Daerah Sekitar Monumen Kota Sampang Madura

No.	Jumlah Pedagang	Jenis Usaha Yang Diperdagangkan
1	8	Jual rokok + es degan + pop ice + es jus
2	16	Nasi goreng
3	11	Mie ayam + bakso + ayam bakar
4	5	Martabak + terang bulan
5	12	Soto + es campur
6	8	Nasi pecel + nasi burung
7	8	Ayam goreng dan bebek goreng
8	10	Sate + gado - gado

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sampang

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan pedagang yang berdagang di alun-alun kota Sampang berjumlah 78 orang pedagang dengan berbagai jenis barang yang diperdagangkan.

Pedagang yang sekarang ada, seharusnya tidak lagi berstatus sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL selama ini hanya diwajibkan membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan Perda No. 27 tahun 2002. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/badan.

Subyek retribusi adalah pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban. Proses pembayaran retribusi dilakukan langsung oleh dinas yang bersangkutan (Satpol PP) yang ditujuk oleh dinas yang bertanggung jawab dimana hasil dari penarikan retribusi tersebut akan diserahkan kepada Dispendaloka untuk masuk ke kas daerah sebagai dana untuk pembangunan daerah tersebut. bagi pedagang yang sudah membayar sejumlah retribusi yang dikenakan kepadanya, maka pedagang tersebut akan mendapatkan tanda bukti berupa laporan kegiatan retribusi untuk mengetahui atau memudahkan pegawai yang melakukan penarikan retribusi kepada para pedagang. Untuk menjadi anggota dalam paguyuban pedagang kaki lima di Kota Sampang harus melalui beberapa persyaratan terlebih dahulu. Pertama harus jelas jenis barang yang akan diperdagangkan, kemudian mendaftarkan diri sebagai anggota dengan mengisi formulir pendaftaran serta surat ijin penggunaan tempat atau fasilitas umum yang telah diatur oleh dinas yang bersangkutan (Satpol PP).

Retribusi menurut Perda Keputusan Bupati Kabupaten Sampang No. 27 tahun 2002 Pasal 1 ayat (h) yang menyatakan: "Retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) yang selanjutnya disebut retribusi

adalah pembayaran atas pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi”. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa retribusi dikenakan kepada wajib retribusi yaitu pedagang kaki lima atas pengaturan tempat usaha yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan besarnya retribusi diatur dalam Perda Kabupaten Sampang No. 27 tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan: ”Setiap orang yang telah memperoleh izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan retribusi sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)/m² perhari”. Sedangkan bagi yang melakukan pelanggaran berupa penundaan pembayaran atau kurang membayar retribusi, dikenakan sanksi administrasi yaitu berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi, sanksi administrasi ini diatur dalam Perda Kabupaten Sampang No. 27 tahun 2002 Pasal 14.

Luas daerah yang disewakan untuk para pedagang yang berdagang di alun-alun kota Sampang seluas 3 x 3 untuk satu orang pedagang dengan besarnya retribusi per m² adalah Rp. 50-. Untuk pendapatan retribusi per bulannya tergantung dari jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan. Adapun perhitungan besarnya retribusi yang dikenakan kepada para pedagang adalah sebagai berikut:

1. Per pedagang $3 \times 3 = 9 \text{ m}^2$, sehingga per pedagang dikenakan biaya sebesar $9 \times \text{Rp. 50} = \text{Rp. 450}$.

2. Dalam satu paguyuban terdapat 78 orang pedagang, sehingga pendapat yang diperoleh setiap harinya sebesar $78 \times \text{Rp. } 450 = \text{Rp. } 35.100$.
3. Setiap bulan pendapatan yang diterima sebesar $30 \times \text{Rp. } 35.100 = \text{Rp. } 1.053.000$.
4. Dalam satu tahun pendapatan yang diterima sebesar $12 \times \text{Rp. } 1.053.000 = \text{Rp. } 12.636.000$.

Pendapatan Retribusi tiap bulannya dapat berubah, dengan permasalahan yang disebabkan oleh pedagang yang tidak berjualan dikarenakan hujan dan tidak berjualan pada hari libur, maka jumlah pedagang berkurang dan pendapatan retribusi juga dapat mengalami penurunan karena pada saat Pedagang Kaki Lima tidak berjualan, maka dinas yang berkaitan (Satpol PP) tidak melakukan penarikan biaya retribusi terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak berjualan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Diyanto, SH selaku bagian Kasi Pembinaan, Operasional dan Pengawasan dinas Kota Sampang diperoleh informasi bahwa pada awalnya retribusi penggunaan tempat usaha ditetapkan setiap 6 bulan sekali dan setiap 1 tahun sekali, akan tetapi banyak pedagang yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut karena para pedagang merasa dirugikan akibat dari jarang berdagang atau barang dagangannya tidak banyak yang terjual. Sehingga pihak pemerintah daerah Kabupaten Sampang memberikan keringanan untuk membayar yaitu dengan cara mencicil untuk setiap harinya.

Selain itu terdapat retribusi tidak resmi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada para Pedagang kaki lima (PKL) Setiap PKL harus membayar beberapa ribu setiap harinya. Pungutan liar (pungli) ini diberlakukan dari beberapa lama waktu yang lalu. Dalih pemungut, untuk uang kebersihan hingga keamanan. Oleh karena itu para pedagang berharap dengan besarnya biaya pungutan yang wajib dibayar oleh para pedagang, para pedagang ingin mendapatkan fasilitas yang memadai seperti jaminan keamanan yang bagus serta tidak ada pungutan-pungutan liar yang tidak berizin sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pedagang diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai dan bagus yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Sampang dalam hal ini dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab atas retribusi dan sebagainya atas para PKL.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas maka peneliti ingin mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah tentang retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di Kota Sampang terutama di alun-alun. Oleh karena itu, maka penelitian ini di beri judul: **Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (Studi Tentang PKL di Sekitar Monumen Kota Sampang).**

1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah akan dibatasi pada: Bagaimanakah implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan solusi bagi pemerintah daerah dalam penanganan kebijakan pemerintah dalam hal retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen Kota Sampang berdasar hasil dari penelitian khususnya dalam penarikan retribusi tempat usaha perdagangan kaki lima.
2. Resistensi yang dilakukan masyarakat terkait dengan kebijakan pengaturan tempat usaha perdagangan kaki lima sebagai masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan penarikan tempat usaha perdagangan kaki lima.

3. Dalam ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan baru yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan karena belum diketemukan penelitian yang sama pada waktu sebelumnya.